**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KEPENGHULUAN BAGAN BATU BARAT
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh:

Muhammad Nurman

Email : Muhammadnurman24@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aimed to determine the programs and the factors that thread to attending empowerment program in Kepenghuluan Bagan Batu Barat Bagan Sinembah Distric of Rokan Hilir Regency that doing by Community Empowerment (BAPEMAS) Rokan Hilir Regency. This research occurs at the Kepenghuluan Bagan Batu Barat Bagan Sinembah distric Rokan Hilir Regency. This research using qualitative method. The data collection techniques in this study using the technique of in-depth interviews and documentation and the data obtained from the study site will be processed and analyzed further by way of outlining the facts which has been found from the study site.

From the interview to the informant and based on the data and information obtained by researchers when doing research on-site research, it can be concluded that the Empowerment program conducted in Kepenghuluan Bagan by Community Empowerment (BAPEMAS) has not been implemented optimally, there are still some obstacles in its implementation, both internally and externally. Inhibiting factors internal include: infrastructure is inadequate, lack of Human Reseources, there is postphone program, lack of coordination, lack of expert people, while factors external lack motivation of the society, officer is inaduate, lack of Human Resources that Expert, the economic community unoptimal.

Keywords: Empowerment, Empowerment Program, Factors on the Program

Pendahuluan

Pembangunan bersifat nasional pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama diperuntukan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil

Indonesia sesuai dengan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang juga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan

rakyat dapat ditingkatkan jika permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi, sehingga dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum dapat dilakukan salah satunya melalui penanggulangan kemiskinan.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat dijadikan alternatif solusi bagi pemerintah untuk menyikapi fenomena-fenomena tersebut, terutama dalam rangka melaksanakan program pembangunan, perencanaan dasar dan substansi yang ingin diangkat yaitu pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat dikatakan sebagai perwujudan paradigma yang berpusat pada masyarakat.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Nasional dan Internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan Pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan (Suriadi, 2005: 56).

Bagan Batu Barat merupakan Kepenghuluan yang diberdayakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) di Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tangguh serta menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Harapan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir nantinya dapat mengakses secara langsung dengan meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat suatu daerah yang tercermin dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan kemajuan pembangunan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang dan identifikasi masalah yang diperoleh, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Bagan Batu Barat?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pada pelaksanaan program tersebut ?

Kerangka Teoritis

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment* yang berarti “pemberdayaan” adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan

barat, utamanya eropa. Beberapa literatur menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan sudah dikenal sejak revolusi industri atau sejak lahirnya eropa modern pada abad 18. Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 70-an dan kemudian berkembang terus sepanjang dekade 90-an hingga saat ini. Kemunculan konsep pemberdayaan hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi dan personalisme. Bermunculan pula konsep-konsep seperti elit, kekuasaan, antikemapanan, gerakan populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, dan *civil society* (vidhyandika 1996 : 44)

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai.

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi ditingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan ditingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). *Community Development* adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak

lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri, yang berarti bahwa subttansi utama dalam aktifitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks pemberdayaan, semua orang (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, parpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkatkan kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan kerjasama, sehingga bisa terjalin kerja sama yang baik.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut World Bank (2001) mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat

(miskin) untuk mampu bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberaniannya untuk memilih konsep, metode, produk, tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya.

Berdasarkan dari uraian diatas para ahli mendefinisikan pemberdayaan beragam pengertian. Menurut Neo Etal (dalam A.usmara 2002 : 123) pemberdayaan adalah pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan menurut (Edi Suharto,2006 : 58) yaitu :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan kurang beruntung.
2. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Vidhyandika (1996 : 56) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional dan internasional, maupun dibidang poltik, ekonomi dan lain-lain. Sedangkan menurut Rappaport (dalam Harry Hikmat 2004 : 3) Pemberdayaan adalah sebagai pemahaman secara psikologi pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang.

Macaulay (dalam Syarif Makmur, 2008 :53) Pemberdayaan adalah upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara melaksanakan pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Sementara itu, Mc Ardle (dalam Harry Hikmat 2004 : 3) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen keputusan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas Kartasmita (dalam Syarif Makmur, 2008 : 55) menyatakan pemberdayaan adalah unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*Survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Menurut powel (dalam Mangku Purnomo, 2004 : 79) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (*power*) dan meningkatkan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses kesumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu ekosistem maupun organisasi.

Sedangkan Arifin Gani (2002 : 124-125) melihat pemberdayaan tersebut dilihat dari upaya perbaikan wujud interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan upaya penyempurnaan elemen tatanan yang diarahkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri, dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai kondisi yang memungkinkan dalam membangun dirinya sendiri.

Sardlow (dalam Isbandi Rukmito Adi, 2003 : 54) memberikan pengertian mengenai pemberdayaan, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan berusaha untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (*“such a defenition of empowerment is centrally about people*

taking of their own lives and having power to shape their own future”).

Menurut Oakley dan Marsden (dalam Vidhyandika, 1996 : 56-57) mengemukakan proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu : *pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Jones (dalam Vidhyandika, 1996 : 215) mengatakan “*the key to empowerment is creating mutual, autonomous and authentic relationship*”. Hanna dan robinson (dalam Harry Hikmat, 2001 : 19) mengemukakan ada tiga strategis utama pemberdayaan dalam praktek perubahan, yaitu :

1. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memiliki kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
2. Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
3. Strategi transformasi menunjukkan bahwa pendidikan massa jangka panjang sebelum pengidentifikasian kepentingan sendiri.

Selanjutnya Korten dan Carner (dalam Harry Hikmat, 2001 : 96) mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep

perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu sebagai berikut :

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa kemandirian sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chamber, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

Selanjutnya, Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu : Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Terhadap hal tersebut Mardikanto (2003) menambahkan pentingnya Bina kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan) itu akan hanya terwujud seperti yang diharapkan, mana kala didukung oleh efektifitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 bina (bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan). Berarti

pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga pada masyarakat yang memiliki sumber daya yang masih terbatas untuk dapat dikembangkan hingga mencapai kemandiriannya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat.

Pembahasan

1. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan umum yang sampai saat ini belum ditemukan solusi terbaik dalam penanganannya, oleh karena itu dibutuhkan penanganan dan penanggulangan yang optimal secara terus menerus terkoordinir dan terkoordinasi. Hal ini dipandang perlu untuk memantapkan strategi dan langkah-langkah dalam rangka percepatan sasaran pembangunan yang telah dicanangkan melalui program pembangunan dan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang

paling populer, sebagai bentuk upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih sejahtera dan mandiri. Program pemberdayaan adalah cara yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan kemiskinan, tanpa terkecuali di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Banyak hal dan upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan di Indonesia, namun pada umumnya upaya-upaya pendekatan dan pemberdayaan berupa program atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selalu bersifat *top down* yang tidak tepat sasaran. Selain itu juga hal tersebut terkesan hanya melaksanakan program atau proyek saja, sehingga tidak membuahkan hasil dari upaya pemecahan permasalahan kemiskinan melainkan semakin bertambahnya permasalahan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat Pemerintah Daerah serta sebagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan sebagai hasil yang dicapai.

Pemberdayaan yang baik haruslah melihat esensi dari permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dialami masyarakat miskin pada umumnya, melihat apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengatasinya, agar hal tersebut haruslah benar-benar menjadi permasalahan yang difokuskan, sehingga upaya proses pemberdayaan dapat dilakukan secara matang dan dapat berjalan secara optimal. Jika adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan, maka yakinlah akan menghasilkan partisipatif pembangun tata pemerintahan yang lebih baik. Meningkatkan harkat martabat, kemakmuran yang lebih merata dan hal yang terpenting

adalah berkurangnya masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Kepenghuluan Bagan Batu Barat merupakan Kepenghuluan yang berada dalam Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Kepenghuluan ini dimekarkan sejak Tahun 2014 dari Bagan Batu Induk. Salah satu tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir membentuk Kepenghuluan Bagan Batu Barat ialah supaya terjadi pemerataan jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir. Fenomena yang terjadi sejak dimekarkan Kepenghuluan belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Terlihat dari data statistik perekonomian Kecamatan Bagan Sinembah bahwa Kepenghuluan Bagan Batu Barat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dari seluruh Kepenghuluan dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat dijadikan alternatif solusi bagi Pemerintah untuk menyikapi fenomena-fenomena tersebut, terutama dalam rangka melaksanakan program pembangunan. Rencana dasar dan substansi yang ingin diangkat yaitu pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat dikatakan sebagai perwujudan paradigma yang berpusat pada masyarakat.

A. Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BAPEMAS

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama :

1. Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
2. Ketahanan Masyarakat desa

3. Pengembangan Usaha Perekonomian Desa (UED)
4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
5. Penataan Pemukiman
6. Sarana dan Prasarana serta perencanaan pembangunan desa

B. Program dan Kegiatan Masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu Barat

Dari hasil forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bagi setiap SKPD. Dalam keadaan banyaknya usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran indikatif setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan forum SKPD berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan merupakan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) yang terdiri dari program Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.

2. Program Pembangunan Pemukiman

Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kondisi dimana masyarakat itu sendiri tinggal. Kondisi tempat tinggal atau pemukiman menjadi salah satu syarat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang tidak layak akan mempengaruhi tingkat aktivitas masyarakat. Salah satu program yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam menangani permasalahan pemukiman masyarakat ialah dengan melakukan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), program ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu dan memiliki hunian yang tidak layak untuk ditinggali. Untuk Kepenghuluan Bagan Batu Barat telah dibangun 2 unit Rumah Layak Huni (RLH). Hal ini berdasarkan penilaian dari pihak Kepenghuluan dan dibantu oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) untuk menghindari kecemburuan dari masyarakat lainnya yang ada di kepenghuluan Bagan Batu Barat.

3. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan

Dalam era modern seperti sekarang ini perempuan tidak lagi sama seperti kehidupan pada masa lampau. Saat ini perempuan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bersosial. Oleh karena itu perempuan sudah seharusnya memiliki kemampuan intelektual yang memadai sehingga mampu bersaing dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jika dilihat dari kehidupan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat khususnya untuk kehidupan perempuan masih jauh dari yang diharapkan. Pola pikir yang sederhana menyebabkan perempuan masih sulit ikut berpartisipasi dalam setiap program yang telah diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS).

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Ketersediaan air baku atau air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat masih sangat sedikit. Tercatat pada tahun 2015 hanya ada drainase air baku sebanyak 2 unit. Ini jauh dari kata cukup mengingat jumlah penduduk di Bagan Batu Barat sangat banyak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi BAPEMAS

1. Kendala Internal

- a. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung keseluruhan program.
- b. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Badan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir belum memadai.
- c. Masih terdapat tumpang tindih program sehingga menyebabkan beberapa program tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Kurangnya koordinasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan aparatur Kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
- e. Terbatasnya tenaga ahli dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan pemberdayaan masyarakat sehingga kurangnya penguasaan terhadap teknologi dan informasi terhadap program pemberdayaan.

2. Kendala Eksternal

Salah satu yang menjadi kendala dan penyebab kegagalan kebijakan dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dimana :

- Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan
- Kemampuan pengurus lembaga kemasyarakatan belum memadai untuk melakukan suatu kegiatan
- Rendahnya kapasitas dan lembaga kemasyarakatan di Kepenghuluan.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian untuk menjadi perpanjangan tangan perogram
- Keberadaan lembaga perekonomian Kepenghuluan belum berfungsi maksimal

Masyarakat masih sulit dalam mendapatkan informasi dan data mengenai pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan kepenghuluan.

Kesimpulan

Pemberdayaan yang baik haruslah melihat esensi dari permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dialami masyarakat miskin pada umumnya, melihat apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengatasinya, agar hal tersebut haruslah benar-benar menjadi permasalahan yang difokuskan, sehingga upaya proses pemberdayaan dapat dilakukan secara matang dan dapat berjalan secara optimal. Jika adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan, maka yakinlah akan menghasilkan partisipatif pembangun tata pemerintahan yang lebih baik.

1. Peran pemerintah daerah khususnya Badan pemberdayaan masyarakat (BAPEMAS) dalam melaksanakan program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat melalui :

- a. Penilaian Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja, hal ini dilakukan untuk mengukur realisasi capaian-capaian target pelaksanaan suatu program agar terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), hal ini dilakukan untuk melihat apakah perumusan kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan perencanaan awal.
- c. Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BAPEMAS, hal ini berguna untuk mendapatkan kinerja yang akurat dan konsisten mengenai pencapaian kinerja dan sebagai alat pengambilan keputusan mengenai pembiayaan, manfaat dan tujuan program tersebut.
- d. Program dan Kegiatan Masyarakat Kepenghuluan Bagan Batu Barat, hal ini dilakukan sebagai bentuk realisasi dari rencana kerja yang telah dibuat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung keseluruhan program.
- b. Kurangnya koordinasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan aparatur Kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rokan Hiir.
- c. Kendala eksternal : Rendahnya motivasi, Kemampuan pengurus lembaga kemasyarakatan belum memadai,
- d. Rendahnya kapasitas dan lembaga kemasyarakatan di Kepenghuluan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian, keberadaan lembaga perekonomian Kepenghuluan belum berfungsi maksimaL.

Saran

1. Peran pemerintah daerah khususnya Badan pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam melaksanakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat perlu dioptimalkan lagi, khususnya dari pengawasan program yang telah dibuat, dan partisipasi masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya sekali namun dalam pelaksanaannya perlu berulang demi mendapatkan hasil yang diharapkan, yakni meningkatnya kesejahteraan yang dilihat dari perekonomian masyarakat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adi, Isbandi Rukmito. 2003. **Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi**. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Adi, Rianto. 2004. **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Pertama**. Jakarta : Granit.
- Agus, Suriadi. 2005. **Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat**. Jakarta: Balai. Pustaka.
- Gani, Arifin, 2002. **Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat**. Surabaya : SIC 2002.
- Hikmat, R. Harry, 2004. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**. Edisi Revisi : Bandung, Humanira Utama Press
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. **Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan**. Jakarta : Pustaka Belajar.
- Makmur, Syarif, 2008. **Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nogi, S. Hessel. 2000. **Analisis Kebijakan Publik Kontemporer**, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Nugroho Rian, 2003. **Kebijakan Publik Formulasi Implementasi, Implementasi dan Evaluasi**. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Purnomo, Mangku, 2004. **Pembaharuan Desa**. Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta
- Soeharto, Edi, 2005. **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sumadyo, Hadi, 2001. **Psikologi Sosial**. Bandung : Pustaka Setia
- Sumaryadi Nyoman, 2005. **Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat**. PT.Citra Utama, Jakarta.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2003. **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung.
- Usmara. (2002). **Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jogjakarta: Asmara Books.
- Vidhyandika, Moeljanto. 1996. **Pemberdayaan Kelompok**

Masyarakat Melalui Program IDT.
Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2007. **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**, (Edisi Revisi), Media Pressindo : Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
No 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Rokan
Hilir